



## PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGAWASAN MARITIM DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Rizki Roza\*)

### Abstrak

*Negara-negara di kawasan Asia Tenggara harus menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, baik tradisional maupun non-tradisional. Kondisi ini mendorong sejumlah negara di kawasan untuk mengupayakan peningkatan kemampuan pengawasan maritim, dan bahkan mendorong Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk memberikan bantuan. Bantuan tersebut dapat memberi manfaat besar namun juga dapat meningkatkan ketegangan di kawasan sehingga harus disikapi dengan hati-hati.*

### Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan Australia mengumumkan pemecatan Kapten Angkatan Laut Australia, Laksamana Madya Ray Giggs, dan enam perwira lainnya terkait tindakan indisipliner karena berlayar terlalu dekat ke Indonesia. Pelanggaran wilayah itu terjadi saat angkatan laut Australia sedang dalam misi menghadang dan mengembalikan kapal-kapal yang ditumpangi para pencari suaka ke Indonesia. Kebijakan Australia untuk menghentikan penyelundupan manusia tersebut telah memperkeruh hubungan Indonesia-Australia yang sedang terganggu akibat masalah penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah petinggi Indonesia. Selain

itu, insiden yang bagi Indonesia merupakan suatu pelanggaran kedaulatan negara, juga mencerminkan masih lemahnya kemampuan pengawasan maritim Indonesia.

Insiden pelanggaran wilayah yang dilakukan Australia tersebut merupakan contoh nyata bagaimana persoalan keamanan maritim dapat secara langsung mempengaruhi hubungan antar-negara. Isu penyelundupan manusia hanya salah satu dari berbagai persoalan keamanan maritim yang harus dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pengawasan maritim tidak hanya penting untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim, tetapi juga untuk menghindari kemungkinan

\*) Peneliti Muda Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rizki.roza@dpr.go.id



terjadinya insiden yang berkaitan. Tulisan singkat ini akan mengulas sejumlah persoalan keamanan maritim yang dihadapi negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan bagaimana kemampuan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga keamanan maritim di kawasan.

## Isu-isu Keamanan Maritim Asia Tenggara

Persoalan keamanan maritim dewasa ini menjadi salah satu perhatian masyarakat internasional. Isu keamanan maritim mencakup persoalan keselamatan navigasi dan kejahatan transnasional seperti perompakan, penyelundupan manusia, dan terorisme maritim. Isu keamanan non-tradisional lainnya seperti keamanan lingkungan maritim, dan bahkan *search and rescue* di laut juga menjadi cakupan isu keamanan maritim. Kawasan Asia Tenggara yang didominasi wilayah perairan tentunya juga harus menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tantangan keamanan maritim.

Hingga saat ini, negara-negara Asia Tenggara masih harus menghadapi sejumlah isu keamanan tradisional yang dapat mengancam keamanan maritim kawasan. Beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat dalam sengketa perbatasan maritim, baik bilateral maupun multilateral. Persoalan tumpang tindih klaim di Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara dan China yang akhir-akhir ini cenderung asertif, merupakan persoalan utama yang dapat mengancam keamanan maritim kawasan. Sengketa perbatasan teritorial maupun perbatasan maritim di Asia Tenggara tidak jarang berujung pada insiden-insiden di lapangan yang jika tidak dikelola dengan baik maka tidak hanya berpotensi merusak hubungan dua negara tetapi dapat juga memicu terjadinya perang terbuka.

Tidak hanya itu, ancaman keamanan non-tradisional juga harus dihadapi oleh negara-negara di kawasan. Keamanan lingkungan maritim menjadi perhatian negara-negara pantai di kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan Malaysia. Kedua negara menghadapi ancaman pembuangan limbah ilegal dan penyebab pencemaran laut lainnya. Pencemaran laut merupakan ancaman bagi industri perikanan, pariwisata, serta habitat laut. Dengan meningkatnya lalu lintas pelayaran di kawasan ini, sementara masih lemahnya kemampuan pengawasan maritim maka ancaman terhadap keamanan lingkungan maritim juga akan terus meningkat.

Aktivitas bajak laut, meskipun cenderung mengalami penurunan, masih merupakan gangguan keamanan maritim di kawasan. Kegiatan penyelundupan melalui laut, termasuk penyelundupan manusia, narkotika, dan senjata memiliki sejarah panjang di kawasan, dan masih terjadi hingga saat ini. Kawasan Asia Tenggara juga rentan terhadap potensi bencana alam maritim sebagaimana bencana tsunami yang melanda kawasan pada 2004 dan badai Nargis yang menghantam Myanmar pada 2008. Berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan ilegal, Indonesia merupakan negara di kawasan yang paling dirugikan. Upaya-upaya untuk mengamankan sumber daya perikanan tidak jarang memicu insiden, baik antara aparat penegak hukum dengan para pencuri ikan, ataupun antar-sesama penegak hukum dari dua negara bertetangga.

## Kemampuan Pengawasan Maritim di Asia Tenggara

Dihadapkan pada berbagai ancaman keamanan maritim, baik tradisional maupun non-tradisional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara dituntut untuk memiliki kemampuan pengawasan maritim yang memadai. Potensi konflik di LCS merupakan salah satu faktor yang mendorong beberapa negara di kawasan untuk meningkatkan kekuatan angkatan lautnya, sementara beberapa negara lainnya meningkatkan pengawasan maritim untuk menghadapi ancaman keamanan maritim non-tradisional.

Mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dalam beberapa dekade terakhir memungkinkan Vietnam untuk menaikkan anggaran pertahanannya secara signifikan. Vietnam melakukan modernisasi kekuatan angkatan lautnya, baik dengan membangun kapal perang baru, peremajaan kapal yang sudah ada, serta melakukan modernisasi jaringan radar pengawas pantainya. Pertimbangan pertumbuhan ekonomi maritimnya dan sengketa LCS menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pertahanan Vietnam. Modernisasi yang tengah dijalankan Vietnam mendorong dikembangkannya kemampuan untuk melaksanakan operasi militer di kawasan maritim Vietnam. Selain itu, Vietnam juga berusaha meningkatkan kapabilitas *Marine Police*, termasuk memperkuat elemen udaranya melalui pengadaan sejumlah pesawat patroli maritim.

Meningkatnya ketegangan di wilayah sengketa LCS tampaknya juga mempengaruhi arah kebijakan pertahanan Filipina. Berbagai ancaman terhadap kepentingan maritimnya

telah mendorong Filipina untuk meningkatkan kemampuan angkatan laut dan udara. Sejak menjabat Presiden Filipina pada Juli 2010, Benigno Aquino III berkomitmen untuk memodernisasi angkatan bersenjata Filipina, baik untuk tujuan pertahanan teritorial maupun misi penanggulangan bencana. Dalam program modernisasi Aquino, angkatan bersenjata Filipina akan dilengkapi armada pesawat modern untuk melaksanakan patroli maritim mengawasi teritori maritim dan zona ekonominya.

Sekalipun ketegangan di LCS bukan faktor utama yang mendorong modernisasi militernya, Malaysia juga berupaya meningkatkan kemampuan pengawasan maritim. Pengadaan sejumlah kapal patroli maritim menjadi bagian penting upaya Malaysia untuk memperbaharui alutsistanya. Demikian pula halnya dengan Brunei Darussalam, modernisasi kekuatan militer yang dilakukannya hampir tidak terpengaruh oleh peningkatan ketegangan di LCS. Perkembangan ancaman-ancaman non-tradisional lebih menjadi pertimbangan kebijakan peningkatan kekuatan militer Brunei. Melindungi sumber daya maritim di mana Brunei menggantungkan perekonomiannya menjadi bagian penting dari kebijakan pertahanan Brunei.

Indonesia, sebagai konsekuensi Konvensi Hukum Laut 1982, memiliki kewajiban untuk menyediakan alur laut kepulauan untuk dapat dilalui oleh kapal dan pesawat asing. Indonesia juga berkewajiban untuk menjamin keselamatan dan keamanan maritim bagi kapal dan pesawat udara yang menggunakan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peningkatan kemampuan pengawasan maritim sangat penting bagi Indonesia untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya. Penguatan armada kapal patroli dan penjaga perbatasan maritim menjadi salah satu prioritas program modernisasi alat utama sistem persenjataan yang sedang dilakukan Indonesia.

Pentingnya keamanan maritim Asia Tenggara juga telah mendorong negara-negara di kawasan membangun kerangka kerja sama untuk merespon ancaman-ancaman keamanan maritim. Keamanan maritim ditempatkan sebagai salah satu elemen penting ASEAN *Security Community*. Melalui kerangka ASEAN *Maritime Forum*, negara-negara di kawasan membahas langkah-langkah untuk menghadapi persoalan pembajakan, perampokan bersenjata, lingkungan kelautan, penangkapan ikan ilegal, serta penyelundupan barang, manusia, senjata, dan narkoba. Persoalan-

persoalan keamanan maritim juga dibahas negara-negara anggota ASEAN bersama negara lainnya yang berkepentingan melalui kerangka ASEAN *Regional Forum*. Tidak hanya melalui dua forum ini, negara-negara anggota ASEAN juga mengembangkan kerjasama dengan negara-negara mitra, misalnya melalui *ASEAN-EU Experts Meeting on Maritime Security*, *ASEAN-Japan Maritime Port and Transport Security*, dan sebagainya.

## Bantuan Peningkatan Pengawasan Maritim

Peningkatan kemampuan pengawasan maritim negara-negara Asia Tenggara tidak hanya penting bagi negara bersangkutan, tetapi juga penting bagi negara lain yang memiliki kepentingan atas keamanan maritim kawasan. *The Yomiuri Shimbun* memberitakan bahwa AS dan Jepang bermaksud untuk bersama-sama membantu negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kemampuan pengawasan maritim mereka. Hal ini tidak dapat dipisahkan dengan upaya untuk meredam ambisi maritim China di kawasan. Dengan membantu negara-negara anggota ASEAN meningkatkan kapabilitas penjaga pantai dan organisasi terkait lainnya, AS dan Jepang berharap agar negara-negara tersebut juga akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merespon bencana alam.

Kerja sama AS-Jepang tersebut dikabarkan akan mencakup pengadaan kapal patroli, bantuan pelatihan personel penjaga pantai dan organisasi lainnya yang relevan, dan bantuan membangun kerangka kerja sama berbagi informasi yang berkaitan dengan kapal perompak dan kapal-kapal yang mencurigakan lainnya.

AS dan Jepang sendiri meyakini bahwa dengan membantu meningkatkan kemampuan negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan pengawasan maritim, akan memberikan manfaat pada kepentingan kedua negara di kawasan. Peningkatan kemampuan maritim Vietnam dan Filipina merupakan bagian penting untuk meredam perkembangan kemampuan maritim China, berkaitan dengan sengketa di LCS. Sementara itu, peningkatan kemampuan pengawasan maritim Indonesia dan Malaysia memiliki arti penting bagi pengamanan jalur pelayaran yang digunakan oleh kapal-kapal tanker dari Timur Tengah ke Asia Timur yang sering mendapat gangguan perompak. Peningkatan kemampuan pengawasan maritim negara-negara anggota ASEAN akan membantu mengamankan jalur pelayaran yang vital bagi AS dan Jepang.

## Penutup

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia harus menyikapi bantuan ini dengan hati-hati. Komitmen AS dan Jepang ini dapat memberi manfaat besar bagi negara-negara di kawasan yang memang tengah berupaya melakukan peningkatan kemampuan pengawasan maritim. Namun di sisi lain, bantuan ini dapat juga meningkatkan ketegangan berkaitan dengan kecenderungan China yang sensitif akan keterlibatan negara dari luar kawasan atas isu sengketa LCS. Menjadi tugas DPR RI untuk mengingatkan pemerintah agar tetap secara konsisten turut berkontribusi dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa LCS dengan cara-cara damai, sementara juga memanfaatkan berbagai kerja sama internasional yang bermanfaat bagi upaya Indonesia meningkatkan kemampuan pengawasan maritim dengan tanpa mengganggu stabilitas kawasan.

## Rujukan

1. IISS, *The Military Balance 2009*, London: International Institute for Strategic Studies, 2009.
2. IISS, *The Military Balance 2013*, London: International Institute for Strategic Studies, 2013.
3. “Japan, U.S. to help ASEAN monitor seas”, <http://the-japan-news.com/news/article/0001221995> diakses tanggal 19 April 2014.
4. “Kapten AL Australia dipecat karena ‘menyusup’ ke Indonesia”, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140417\\_komandan\\_angkatan\\_laut\\_australia.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/04/140417_komandan_angkatan_laut_australia.shtml), diakses tanggal 19 April 2014.
5. “Kebijakan sekoci keruhkan hubungan Indonesia-Australia”, [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2014/02/140206\\_suaka\\_sekoci.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2014/02/140206_suaka_sekoci.shtml) diakses tanggal 19 April 2014.
6. Kwa Chong Guan & John K. Skogan, *Maritime Security in Southeast Asia*, New York: Routledge, 2007.
7. “Malaysian Defence Modernisation, Asian Military Review”, <http://www.asianmilitaryreview.com/malaysian-defence-modernisation/> diakses tanggal 19 April 2014.
8. Richard D. Fisher, Jr., “Defending the Philippines: Military Modernization and the Challenges Ahead”, *East and South China Seas Bulletin* 3, [http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS\\_ESCS\\_bulletin3.pdf](http://www.cnas.org/files/documents/publications/CNAS_ESCS_bulletin3.pdf) diakses tanggal 19 April 2014.
9. Walter S. Bateman, “Naval Modernisation and Southeast Asia’s Security”, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1851&context=lhapapers> diakses tanggal 19 April 2014.
10. Walter S. Bateman, “Regional Maritime Security: Threats and Risk Assessments”, <http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1423&context=lawpapers> diakses tanggal 19 April 2014.